

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Manajemen

1. Pengertian

Kata manajemen secara etimologis (bahasa) berasal dari bahasa latin yaitu *manus* yang berarti -tangan. Dan menurut bahasa Italia dari kata *maneggiare* yang berarti -mengendalikan- dan menurut bahasa inggris kata manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti -mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan dan memimpin.¹⁷

Pengertian manajemen menurut istilah atau terminologis menurut para ahli sebagai berikut:

1. George R. Terry

Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Henry Fayol

¹⁷ Usman Efendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).18

Manajemen adalah suatu kegiatan yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

3. Oey Liang Lee

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan serta mengawasi manusia dengan bantuan alat-alat sehingga dapat mencapai tujuan.¹⁸

4. Ricky W. Griffin

Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.¹⁹

5. Mary Parker Foliot

Manajemen adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

6. Fredick Winslow Taylor

Manajemen adalah seni untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara sebaik mungkin..

7. Handoko

Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha dari para anggota guna

¹⁸ Nur Salim, *Gerakan Menata Mutu Pendidikan Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ruzz Media, n.d.). 27-28

¹⁹ Mustari Muhammad, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: ajawali Perss, 2015). 16

penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.²⁰

8. Stoner

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan anggota dengan menggunakan sumber daya yang lain untuk

mencapai tujuan yang diinginkan.²¹

9. Haiman

Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha individu untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

10. Abdurrahman Fathoni

Manajemen adalah suatu proses kegiatan menggerakkan kelompok orang dan menggerakkan segala fasilitas yang tersedia untuk mencapai

Beberapa pendapat para ahli terdapat persamaan-persamaan sekalipun memiliki atau dengan redaksi yang berbeda. Dan pengertian manajemen dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan berkesinambungan dengan menggunakan sumber daya yang

²⁰ Budi Mahardika Anang Firmansyah, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020).2-3

²¹ T. Hani Handoko, *Manajemen, 2nd ed.* (Yogyakarta: BPFE, 2012). 10

tersedia yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Fungsi-fungsi Manajemen

Manajemen memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam proses manajemen dan juga sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas masing-masing yang telah diberikan oleh seorang manajer. Dan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien, seorang manajer harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan mengoptimalkan kinerja karyawan.

Draft berpendapat bahwa manajemen memiliki empat fungsi yaitu, perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*).²² Menurut G.R. Terry, fungsi manajemen *planing, organizing, actuating, controlling*. sedangkan menurut John F. Mee, fungsi manajemen diantaranya adalah *planing, organizing, motivating, controlling*.²³ Dari beberapa pendapat para ahli tentang tahapan manajemen pada dasarnya hampir sama dan kesemuanya merupakan tahapan yang harus dilaksanakan oleh manajer secara baik.

²² Abdul Choliq, *Pengantar Manajemen* (Semarang: Rafi Sarana Prakarsa, 2011).36

²³ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005). 5

a. Perencanaan (*planing*) Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan kebijakan atau prosedur dari kegiatan yang telah ada.²⁴ Perencanaan adalah proses persiapan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Perencanaan dibutuhkan untuk memberikan panduan organisasi yang berisi tujuan organisasi, prosedur, waktu dan metode atau strategi pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

Kegiatan perencanaan meliputi kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Perencanaan juga memiliki arti lain kegiatan rasional dan sistematik dalam menetapkan keputusan kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Perencanaan harus memenuhi delapan aspek yaitu, program kerja, tujuan, manfaat program, biaya program, waktu, penanggung jawab pelaksanaan, mitra dan sasaran.²⁵ Atau dapat dikatakan bahwa dalam perencanaan harus meliputi beberapa unsur yaitu :

a) *What* : tindakan apa yang harus dikerjakan ?

²⁴ Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Budi Utama, 2012). 10

²⁵ Fathul Maujud, - Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Islam Dalam Lembaga Pendidikan Islam, 'll *UIN Mataram Penelitian Keislaman* Vol. 14 No (2018): 33.

Dalam hal ini harus dijelaskan dan diperinci aktivitas yang diperlukan, faktor-faktor yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai.

- b) *Why* : apa sebabnya tindakan itu dikerjakan ?

Dalam unsur ini perlu penjelasan dan ketegasan mengapa kegiatan itu harus dikerjakan dan mengapa tujuan itu harus dicapai.

- c) *Where* : dimana tindakan itu harus dilaksanakan ?

Dalam *planing* harus memuat lokasi kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Hal ini diperlukan untuk menyediakan sarana dan fasilitas untuk mengerjakan kegiatan tersebut.

- d) *When* : kapan tindakan itu harus dilaksanakan ?

Hal ini diperlukan adanya jadwal waktu dan kapan dimulainya kegiatan hingga berakhirnya kegiatan tersebut.

- e) *Who* : siapa yang harus melakukan tindakan atau kegiatan itu /

Salah satu isi *planing* memuat tentang para pekerja yang mengerjakan kegiatan tersebut. Disamping itu juga perlu dijelaskan wewenang dan tanggung jawab para pekerja.

- f) *How* : bagaimana cara melaksanakan tindakan itu ?

Dalam *planing* harus dijelaskan teknik, metode dan sistem mengerjakan pekerjaan yang dimaksud.

Perencanaan merupakan fungsi utama dari manajemen karena dalam perencanaan akan dilakukannya sebuah awal dari kegiatan. Jika

tidak ada perencanaan maka manajer tidak akan pernah tahu apa yang akan dilakukan dalam setiap kegiatan untuk mencapai tujuan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam melakukan perencanaan, yaitu :

1) Menetapkan tujuan.

Tahap awal dari sebuah perencanaan adalah menetapkan tujuan yang akan dicapai. Tujuan ini merupakan kesepakatan dari semua anggota sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tanpa adanya tujuan yang jelas maka semua kegiatan akan kehilangan arah dan semua kegiatan akan berjalan tidak seperti yang diharapkan.

2) Mengetahui situasi terkini

Mengetahui situasi ini terkait dengan kesediaan, kualitas dan kesiapan sumber daya yang merupakan potensi organisasi dalam mencapai tujuan.

3) Hambatan dan pendukung

Semua hambatan dan pendukung harus telah diidentifikasi untuk menjadi landasan dalam menentukan langkah dan strategi pencapaian tujuan yang diinginkan. Setelah diidentifikasi hambatan-hambatannya maka harus ada jalan keluar untuk memecahkan menyelesaikan hambatan tersebut.

Tahap akhir dari perencanaan adalah pengembangan alternatif-alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan dan melakukan penilaian terhadap alternatif yang ada untuk dipilih dan itu

merupakan alternatif terbaik yang memberikan keyakinan tujuan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Dengan adanya tahapan-tahapan dalam sebuah perencanaan maka dapat disimpulkan manfaat dari pada perencanaan itu sendiri yaitu : dengan perencanaan dapat meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, pikiran dan biaya, dengan perencanaan dapat memberikan solusi dari setiap masalah yang muncul, perencanaan juga dapat memberikan petunjuk operasional dan dengan perencanaan dapat menempatkan tanggung jawab yang tepat.²⁶

Sebuah perencanaan yang baik disusun dengan sistematis dan berdasarkan fakta-fakta dilapangan. Dan untuk memastikan segala kebutuhan di lapangan sesuai dengan yang telah direncanakan maka harus dipastikan semua rencana telah dikoordinasikan oleh semua anggota.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

²⁶ Pratama, *Pengantar Manajemen*. 43

Menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu untuk mengetahui tugas dan fungsinya menghubungkan orang-

orang yang terlibat dalam organisasi tertentu untuk mengetahui tugas dan fungsinya dalam suatu organisasi.

Pengorganisasian merupakan suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu untuk mengetahui tugas dan fungsinya dalam suatu organisasi.²⁷ Organisasi dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan harus memenuhi unsur dasar pembentuk organisasi antara lain : adanya tujuan bersama, adanya dua orang atau lebih, adanya pembagian kerja yang jelas dan adanya kerjasama yang baik.

Pada struktur organisasi tergambar posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja yang harus dilakukan, hubungan atasan dan bawahan, kelompok, komponen atau bagian, tingkat manajemen dan saluran komunikasi. Suatu struktur organisasi memberikan spesifikasi pembagian kegiatan kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan kerja dan menunjukkan fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda itu dihubungkan. Struktur organisasi juga menunjukkan hirarki dan struktur wewenang organisasi serta memperlihatkan hubungan pelapornya. Struktur organisasi disusun sangat bergantung pada tujuan

²⁷ Maujud, – Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Islam Dalam Lembaga Pendidikan Islam. ‘134

organisasi dan strategi yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan organisasi.

c. Penggerak (Actuating)

Penggerak merupakan fungsi manajemen yang paling utama dari rangkaian proses manajemen. Fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih berkaitan pada aspek-aspek abstrak dari proses manajemen, sedangkan fungsi penggerak lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Penggerak merupakan sebuah tugas dari setiap anggota organisasi untuk bekerjasama dalam satu tim yang berkerja sesuai dengan apa yang telah ditugaskan.²⁸

George R. Terry mengemukakan bahwa *actuating* adalah upaya menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka mau melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan dan tujuan anggota karena anggota juga ingin mencapai tujuan tersebut. Jadi dapat dimengerti bahwa *actuating* tidak lain adalah upaya mewujudkan perencanaan melalui berbagai arahan dan motivasi agar setiap pekerja dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.

Penggerak merupakan aspek hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat bawahan untuk bersedia memahami dan

²⁸ Muhamad Kristiawan, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Budi Utama, 2012). 26

\menyepakati tenaga kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Dalam melakukan hubungan ini seorang manajer harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1) Prinsip mengarah pada tujuan

Tujuan utama pengarahan tampak pada prinsip yang menyatakan bahwa semakin efektif proses pergerakan maka semakin besar kontribusi bawahan terhadap upaya pencapaian tujuan. Pergerakan tidak dapat berdiri sendiri, artinya dalam menjalankan fungsinya perlu mendapat dukungan dari faktor-

faktor lain seperti : perencanaan, struktur organisasi, tenaga kerja yang memadai, pengawasan yang efektif dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bawahan.

2) Prinsip keharmonisan dengan tujuan.

Orang bekerja bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang mungkin tidak sama dengan tujuan organisasi. Harapan yang ada pada anggota adalah tidak terjadi penyimpangan yang terlalu besar dan kebutuhan mereka dapat dijadikan pelengkap dan selaras dengan kepentingan organisasi.

3) Prinsip kesatuan komando

Prinsip kesatuan komando sangat penting untuk mengidentifikasi tujuan dan tanggung jawab bawahan. Bawahan hanya memiliki satu saluran dalam melaporkan semua aktivitasnya yaitu pimpinan.

Dengan demikian konflik dan memberikan intruksi dapat dikurangi serta tanggung jawab mereka semakin besar untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Fungsi dari pergerakan meliputi memberikan motivasi, memimpin, menggerakkan, mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbalan jasa dan lain-lain.

d. Pengawasan atau evaluasi (*controlling*)

Pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kegiatan operasional (*actuating*) telah sesuai dengan rencana (*planing*) berdasarkan tujuan yang hendak dicapai organisasi.²⁹

Pengawasan dapat dilakukan oleh pihak internal organisasi dan pihak eksternal organisasi. Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga atau unit pengawasan tertentu diluar organisasi.

Semua fungsi manajemen tidak akan efektif jika tidak ada pengawasan. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui kinerja dari setiap anggota dengan alasan untuk memastikan semua sesuai dengan yang telah direncanakan, disusun dan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Selain itu juga dilakukan evaluasi pada anggota yang tidak

²⁹ Sampurno Wibowo, *Pengantar Manajemen* (Bandung: Politehnik Telkom, 2009).23

menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas yang diamanahkan.

30

Fungsi dari pengawasan memiliki empat unsur yaitu :

1) Penetapan standar pelaksanaan.

Pemimpin atau manajer memutuskan standar kerja dan target di masa yang akan datang yang akan dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja dari semua anggota.

2) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan.

Mengukur kinerja yang sebenarnya dengan hasil nyata dari semua anggota.

3) Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Di dalam kegiatan ini seorang manajer mengevaluasi kinerja yang sebenarnya untuk melihat kinerja yang kurang maksimal dan menyimpang dari standar yang telah ditetapkan.

4) Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaannya menyimpang dari yang telah ditentukan.

Langkah terakhir yaitu melakukan evaluasi dari hasil kinerja yang telah dikerjakan sebelumnya. Kinerja sudah sesuai yang ditentukan atau menyimpang dari yang telah ditentukan.³¹

³⁰ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen : Teori Dan Aplikasi* (Malang: IKAPI, 2019).20

³¹ Handoko, *Manajemen*. 26

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Secara etimologi, kata pembiayaan berasal dari kata -biaya³² yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *kosten* sedangkan dalam bahasa latin dari kata *causa* yang memiliki arti sebab atau alasan. Sehingga biaya diartikan sebagai pengeluaran yang berkaitan dengan penyebab atau alasan tertentu. Sedangkan secara terminologi, biaya diartikan sejumlah uang atau sumber daya yang dikeluarkan atau diperlukan untuk memperoleh atau melakukan suatu aktifitas atau layanan.³²

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³³

Menurut M. Nur Rianto, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun

³² Purwati, *Akuntansi Manajemen* (Jakarta: Penerbit Salemba, 2023).

³³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 92

lembaga.³⁴ Dan menurut Muhammad, pembiayaan dalam arti yang luas berarti *financing* atau pembelajaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Sedangkan dalam arti yang sempit ialah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.³⁵

Pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan atau yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

D. Pembiayaan Pendidikan

a. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri ataupun oleh lembaga.³⁶ atau bila dikaitkan dengan pendidikan, pembiayaan pendidikan merupakan

³⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012). 42

³⁵ Muhammad, *Manajemen Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005). 304

³⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan* (Yogyakarta: UPP--AMP YKPN, 2005). 56

sumberdaya yang secara langsung menentukan keefektifan dan efisiensi suatu organisasi atau pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada satuan pendidikan Dasar pasal 1 ayat 5, biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai dengan perundang-undangan.

Menurut Yahya sebagaimana dikutip oleh Mulyono, pembiayaan adalah bagaimana mencari dana dan sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan mmerencanakan kebutuhan masa yang akan datang akan uang.³⁷

Menurut Nanang Fattah, biaya pendidikan merupakan sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan keprofesionalan, pengadaan peralatan dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan.³⁸ Sedangkan

³⁷ mulyono, -Konsep Pembiayaan Pendidikan. ll. 36

³⁸ Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan* (PT Remaja Rosdakarya, 2012). 17

menurut Abudin Nata bahwa pembiayaan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai ongkos yang harus tersedia dan diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan strateginya.³⁹

Martin memberikan definisi tentang biaya pendidikan adalah pengeluaran baik yang berupa uang maupun yang bukan / non uang sebagai wujud semua pihak yakni orang tua, masyarakat dan pemerintah pada pembangunan pendidikan agar cita-cita dan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Dalam pengertian umum keuangan kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu :

1. *Budgeting* (penyusunan anggaran)

Penyusunan anggaran dalam sebuah organisasi sangat penting sebagai sebuah panduan penggunaan dana dalam menjalankan sebuah kegiatan organisasi. Susunan anggaran yang disusun harus lengkap dan terinci yang menyangkut sumber, pembiayaan bagi setiap sektor kegiatan dan penanggung jawab kegiatan

2. *Accounting* (pembukuan)

Kegiatan yang ke dua dalam manajemen pembiayaan ini adalah pembukuan atau sebuah kegiatan yang berkenaan pencatatan

³⁹ Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010). 25

keuangan. Kegiatan ini meliputi dua hal, yaitu: 1) pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. 2) menyangkut tindak lanjut. Kegiatan ini meliputi menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang dan tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah bendahara.

3. *Auditing* (pemeriksaan)

Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut penanggung jawab penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh bendahara kepada pihak yang berwenang.⁴⁰

Manajemen biaya adalah suatu aktifitas atau kegiatan pengelolaan biaya dan juga bisa berfungsi sebagai alat perencanaan, keputusan dan kontrol agar kegiatan dapat berjalan dengan maksimal, efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

E. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan

Landasan hukum terkait dengan pembiayaan pendidikan di Indonesia diatur dalam hukum formil yaitu :

1. UUD Negara Republik Indonesia pasal 31 pada ayat 1 – 5 mendapat amandemen IV pada sidang MPR 2022 tanggal 1 – 11 Agustus 2022 pasal 1 – 5 UUD 1945 mengatur tentang kewajiban dan hak warga

⁴⁰ Nanang Fattah, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. 42

negara Indonesia dalam pendidikan, kewajiban pemerintah di bidang pendidikan dasar dan sistem pendidikan anggaran pendidikan nasional. Pasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

2. UUD Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 11 ayat 2 berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Pasal 12 berbunyi : a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan

oleh pendidika yang seagama; b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan; c) mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; d) mendapatkan biaya pendidikan bagi orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; e) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang setara; f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Pasal 34 ayat (1) setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar, (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya (3) wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 62 ayat (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal, (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, membangun sumberdaya manusia dan modal kerja tetap, (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa

mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, (4) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi :: a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, b) bahan dan peralatan pendidikan habis pakati dan c) biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya. (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BNSP.

4. UU Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 1 ayat (15) Gaji adalah hak yang diterima guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (16) Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi yang mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.

F. Jenis-jenis pembiayaan

Jenis pembiayaan pendidikan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 ada tiga jenis pembiayaan pendidikan,

yaitu : biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik.⁴¹

Penjelasan tentang jenis-jenis pembiayaan pendidikan sebagai berikut:

1. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi:
 - a) Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
 - b) Biaya operasi, terdiri dari biaya persolanlia dan nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dll.
 - c) Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - d) Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

⁴¹ Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Buku Pnduan Bantuan Operasional Sekolah*, 2010. hlm. 8

2. Biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.⁴²

Menurut Akdon dkk, jenis dari pada pembiayaan pendidikan dapat dikategorikan dalam empat kelompok, yaitu : biaya langsung (*direct cost*), biaya tidak langsung (*indirect cost*), biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*sosial cost*).⁴³

- a) Biaya langsung (*direct cost*) adalah biaya yang berkenaan atau berkaitan langsung dengan proses pendidikan dan atau operasional sekolah. Biaya ini terdiri dari biaya pembangunan (*capital cost*) dan biaya rutin (*recurrent cost*). Biaya pembangunan contohnya : pembelian tanah bagi pembangunan ruang kelas, perpustakaan, lapangan olah raga dan lain—lain. Sedangkan biaya rutin contohnya : gaji guru dan pegawai, fasilitas belajar, ATK, beke pedoman guru dan buku literatur atau buku pegangan peserta didik.

⁴² Ibid.

⁴³ Akdon dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). 72

- b) Biaya tidak langsung (*indirect cost*) adalah biaya biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik, orang tua, masyarakat untuk menunjang proses belajar, contoh: biaya hidup, kesehatan, pakaian atau seragam, transportasi dan tempat tinggal. Pembiayaan ini tidak terkait dan terbatas pada jenis, waktu dan jumlah yang harus dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait.
- c) Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk anaknya sebagai peserta didik. Biaya ini meliputi: uang sekolah, ongkos dan pengeluaran yang bersifat pribadi.
- d) Biaya personal adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah. Pembiayaan ini diwakili oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap proses pendidikan bagi warganya.

G. Sumber pembiayaan pendidikan

Pembiayaan pendidikan yang ada di Indonesia memiliki beberapa sumber yang dapat digali dan dimanfaatkan dalam menjalankan proses pendidikan di sekolah.⁴⁴ Sumber pembiayaan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar Pasal 3 yaitu : Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah

⁴⁴ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2003). 68

daerah, dan masyarakat. Dan pada pasal 5 dijelaskan bahwa sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan tau pemerintah daerah adalah : anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya, sumbangan pemangku kepentingan, bantuan lembaga lain yang tidak mengikat dan bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan atau sumber lain yang sah.

1. Pemerintah pusat dan daerah

Sistem pendidikan di Indonesia memperlihatkan bahwa biaya sekolah masih dibebankan sebagian besar kepada pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sumber dana pemerintah pusat untuk pembiayaan pendidikan adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam Draf Isian Kegiatan (DIK) maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Disamping itu, pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah terdapat dana dari pemerintah berupa

Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya ditentukan oleh karakteristik siswa dan jenjang sekolah. Sedangkan sumber dana dari Pemerintah Daerah berupa bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang dialokasikan sebesar 20 % sebagaimana yang dimanatkan oleh undang-undang. BOP diberikan kepada seluruh

lembaga pendidikan mulai lembaga tingkat dasar (SD, SMP) dan lembaga pendidikan tingkat menengah (SMA/SMK). Sumber dana dari pemerintah daerah adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik APBD propinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Dana dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan baik untuk kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. Dana dari pemerintah daerah diwujudkan berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesanggupan keuangan pemerintah daerah bersangkutan.

Perencanaan penggunaan dana BOS harus mengikuti aturan peruntukan atau penggunaan dana BOS yaitu : a) Penerimaan peserta didik baru (PPDB), b) Pengembangan perpustakaan, c) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler, d) Kegiatan tes/evaluasi pembelajaran, e) Administrasi kegiatan sekolah, f) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, g) Layanan daya dan jasa, h) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, i) Penyediaan alat multimedia pembelajaran, j) Pembayaran guru yang berstatus non Aparatur Sipil Negara.

RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program

kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta sejumlah kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, RAPBS berisi ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan, dan jumlah nominal dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RAPBS perlu memperhatikan asas anggaran, antara lain : asas kecermatan, asas terinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asas periodik, dan asas pembebanan. Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan keuangan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien.

Penggunaan dana BOS mengacu dan berpedoman kepada RAPBS yang sudah disusun dengan baik menyangkut mata anggaran maupun besar anggarannya. Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga dengan diwajibkannya untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait dengan statistic penerimaan bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, dan pertanggungjawaban keuangan.

Pemerintah selain telah memberikan bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS), juga telah memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Bantuan ini bertujuan untuk mencegah agar peserta didik atau siswa dari masyarakat atau keluarga miskin tidak mengalami

kesulitan dan putus sekolah yang disebabkan oleh kesulitan biaya pendidikan dan memiliki kesempatan yang sama dengan yang lainnya dalam menyelesaikan pendidikan.⁴⁵

2. Orang tua

Selain dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekolah atau lembaga pendidikan bisa mendapatkan bantuan pembiayaan dari orang tua atau wali siswa.

Jenis pembiayaan yang bersumber dari orang tua atau wali siswa antara lain :

1) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

SPP adalah kewajiban orang tua dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan anak-anak yang dibayar berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dan diatur oleh penyelenggara pendidikan.

2) Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (SBP3)

BP3 atau komite sekolah adalah organisasi persatuan orang tua siswa yang diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah.

3) Sumbangan lain-lain

⁴⁵ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, n.d.). 81

Kedua jenis biaya tersebut di atas, ada juga sumbangan dari orang tua yang bersifat insidental, baik berupa uang maupun barang, misalnya biaya praktikum, ketrampilan, kegiatan ekstra kurikuler, peralatan laboratorium, pembangunan pagar sekolah. Peralatan pelajaran dan lain-lain.⁴⁶

Pembiayaan dari orang tua siswa dapat dirinci sebagai berikut : a) uang pangkal, b) uang sumbangan pembinaan pendidikan, c) biaya penilain tengah semester, d) biaya penilaian akhir semester, e) biaya kegiatan ekstra kurikuler, f) biaya kegiatan praktikum, g) pembelian seragam sekolah, h) pembelian buku pelajaran, i) biaya studi tour, sumbangan sosial, dan biaya lain-lain.

⁴⁷

Sumbangan pembiayaan dari orang tua siswa atau wali siswa ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan peran orang tua dalam memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan sehingga tercapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

H. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

1) Pengertian manajemen Pembiayaan Pendidikan.

⁴⁶ Masditou, -Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu, || *Jurnal ANSIRU PAI 1 No. 2 (2017): 119.*

⁴⁷ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Aplikasinya.* (Jakarta: Rajawali Press, 20014). 87

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan suatu proses dalam mengoptimalkan dan memaksimalkan sumber daya yang ada, mengalokasikan dana yang ada, mendistribusikan untuk meningkatkan proses pembelajaran hingga tercipta pembelajaran yang efektif dan efisien.⁴⁸ atau juga bisa dikatakan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan dan tanggung jawab dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Dari definisi di atas terdapat tiga kata kunci dalam manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu optimalisasi sumber dana, alokasi dan distribusi.⁴⁹ Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu penyusunan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accuounting*) dan pemeriksaan (*Controlling*).

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan salah satu substansi dari manajemen pendidikan yang sangat menentukan kualitas proses pendidikan. Ruang lingkup manajemen pembiayaan pendidikan meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian.

Tujuan dari manajemen pembiayaan pendidikan menurut Kadarman dan Yusuf Udaya adalah sebagai berikut :

⁴⁸ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (PT Remaja Rosdakarya, 2013). 72

⁴⁹ Jaja Jahari dan Amirullah Syarbini, *Manajemen Madrasah Teori, Strategi Dan Implementasi* (Bandung: Alfabeta, 2013).73

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan pembiayaan pendidikan.
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pembiayaan pendidikan.
- c. Meminimalkan pembiayaan pendidikan.⁵⁰

Menurut teori dan praktek pembiayaan pendidikan dikenal anggaran belanja pendidikan (*education budgeting*) yang terdiri dari dua komponen yaitu, a) pendapatan, masukan atau penerimaan di satu pihak, b) pengeluaran atau belanja.⁵¹

Titik sentral dari pada manajemen pembiayaan pendidikan adalah bagaimana sumber dana atau dana yang ada mampu dikelola secara profesional sehingga terpenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

2) Prinsip manajemen pembiayaan pendidikan

Kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan di masing-masing lembaga pendidikan harus memperhatikan prinsip-prinsip manajemen pembiayaan sehingga ada sebuah jaminan keberlangsungan dan ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

⁵⁰ AM. dan Yusuf Udaya Kadarman, *Pengantar Ilmu Manajemen : Buku Pnadian Mahasiswa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992). 18

⁵¹ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan*. 4

Menurut Arwildayanto dkk, ada delapan prinsip dalam manajemen pembiayaan lembaga pendidikan, yaitu : a. transparansi, b. akuntabilitas, c. efektivitas, d. efisiensi, e. partisipatif, f. hemat dan tidak mewah, g. terarah dan terkendali, dan h. penggunaan produk dalam negeri.⁵²

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan dalam melakukan manajemen pembiayaan ini.

Penjelasan dari prinsip-prinsip manajemen pembiayaan sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan

Keadilan secara etimologi berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamaratakan yang satu dengan yang lain. Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* keadilan berarti sifat (perbuatan, perlakuan dsb) yang adil. Adil sendiri berarti: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, atau tidak tidak sewenang-wenang.

⁵² Arwildayanto, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2017). 91

Keadilan pendidikan bermakna bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini kemudian dijabarkan dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 merupakan pemberian akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status ekonomi. Prinsip keadilan dalam pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 50 bab V PP 48 tahun 2008 berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Kehadiran pemerintah dalam masalah pendidikan sangat dinantikan oleh seluruh bangsa sebagai pengejawantahan dan dari tuntutan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan mendirikan negara Indonesia adalah -mencerdaskan bangsa. Dan untuk menerapkan undang-undang tersebut maka disusunlah Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 11 ayat (2) menyebutkan -pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Di bagian lain -setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Prinsip keadilan juga merupakan landasan dalam pengelolaan keuangan sekolah yang mendasari penerimaan dan alokasi keuangan sekolah serta akses pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing komponen di sekolah. Komponen tersebut meliputi, siswa, guru, karyawan sekolah dan sarana yang menunjang pencapaian tujuan dari sekolah.

Menurut Hidayat dan Candra W bahwa dalam menyusun anggaran haruslah dialokasikan secara adil untuk seluruh kelompok masyarakat.⁵³

Indikator manajemen pembiayaan yang telah melaksanakan prinsip keadilan apabila terdapat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan dasar bagi masyarakat secara seimbang (subsidi silang, *affirmative action*).
- b. Tersedianya layanan-layanan / fasilitas-fasilitas khusus bagi masyarakat yang kurang mampu.
- c. Adanya pemerdayaan kawasan tertinggal.

Sedangkan indikator keberhasilan pelaksanaan prinsip keadilan dalam manajemen pembiayaan antara lain :

- a. Semua orang berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa terkecuali.

⁵³ Rahmad Hidayat dan Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Al Qur'an Tentang Manajemen Pendidikan Islam* (Medan: LPPI, 2017).

- b. Masyarakat kurang mampu memperoleh layanan-layanan / fasilitas-fasilitas khusus untuk memperoleh pendidikan.

2. Prinsip efisiensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi diartikan sebagai ketepatan cara dalam melakukan sesuatu, dan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang biaya, waktu, dan tenaga. Sedangkan menurut S.P. Hasibuan, pengertian efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* ((hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.⁵⁴

Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output), antara daya dan hasil. Daya itu meliputi tenaga, waktu, pikiran, dan biaya. Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan atau pengelolaan pembiayaan pendidikan akan sangat berpengaruh pada kualitas proses dan pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Konsep tentang efisiensi lebih pada gambaran hubungan antara pemasukan dan pengeluaran. Selain itu juga dikaitkan dengan kualitas layanan, dan keluaran dari aktifitas penyelenggaraan pendidikan. Efisiensi pendidikan merupakan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas akan tetapi mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian dalam

⁵⁴ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 65

masalah efisiensi manajemen pembiayaan pendidikan tentu dikaitkan dengan kualitas hasil suatu kegiatan yang dibiayai sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran, dengan lulusan dan produktifitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, dimana pemanfaatan segala sumber daya yang ada belum menghasilkan lulusan yang sesuai dengan yang diharapkan.

Sekolah harus mampu mengelola dana yang diperoleh dengan baik dan menghindari penggunaan-penggunaan yang tidak perlu atau tidak ada dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Efektifitas pembiayaan adalah merupakan salah satu alat ukur efisiensi, sehingga program kegiatan tidak hanya dihitung berdasarkan biaya tapi juga waktu dan hal yang lebih penting adalah menghindari dan menyeleksi penggunaan dana operasional, pemeliharaan dan biaya yang lain yang mengarah pada pemborosan.⁵⁵

Pembiayaan dikatakan telah efisien apabila pencapaian sasaran atau target diperoleh dengan pengorbanan yang lebih kecil atau dengan biaya yang minim.

⁵⁵ Nanang Fattah, *“Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori Dan Studi Empiris.”*

Efisiensi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu: a) Efisiensi internal yaitu kegiatan yang menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya yang minim. b) efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode

cost benefit analysis yaitu rasio antara keuntungan financial sebagai hasil pendidikan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan

3. Prinsip transparansi

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Edah Jubaedah, transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.⁵⁶

⁵⁶ Edah Jubaedah Dkk, *Model Pengukuran Pelaksanaan Ood Governance Di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* (Bandung: PKP2A//LAN, 2008).

Prinsip transparansi dalam manajemen pembiayaan pendidikan atau keuangan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola kegiatan di lembaga pendidikan. Keterbukaan ini meliputi sumber, jumlah, rincian penggunaan dan petanggung jawaban yang jelas sehingga akan dapat mempermudah bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Adanya transparansi dalam mengelola pembiayaan pendidikan akan lebih meningkatkan kepercayaan semua pihak terutama wali siswa atau masyarakat. Bentuk dari pada prinsip transparansi bisa dilakukan dengan cara menempelkan segala informasi keuangan sekolah di papan pengumuman sekolah.⁵⁷

Masalah transparansi ini telah ditegaskan oleh Undang-undang Republik Indonesia no. 14 Tahun 2008 pasal 2 yaitu bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Dengan dasar undang-undang ini sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dan pengajaran memiliki kewajiban untuk memberikan layanan informasi dan akses informasi kepada semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel.

Tujuan transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. Selain dari pada itu,

⁵⁷ Rahmini H dan Parno, *Manajemen Keuangan : Konsep, Teori Dan Prakteknya Di Sekolah Dan Pondok Pesantren* (Purwokerto: STAIN Press, 2011).

dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan akan dapat menumbuhkan dan menambah wawasan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi.

Penerapan transparansi dalam manajemen pembiayaan pendidikan akan membawa dampak dan konsekuensi pada adanya kontrol yang berlebihan dari publik dan pemangku kepentingan (stakeholder). Dengan demikian transparansi dalam manajemen pembiayaan pendidikan tidak sepenuhnya harus terbuka dan dapat diketahui oleh publik.

Lembaga pendidikan yang telah melaksanakan prinsip manajemen transparansi terdapat indikator :

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab.
- b. Kemudahan akses informasi.
- c. Menyusun mekanisme pengaduan.
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama adengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan dan partisipasi orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program lembaga pendidikan. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan antar komponen penanggung jawab pendidikan melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

4. Prinsip akuntabilitas publik

Kata akuntabilitas berasal dari kata *account* yang berarti catatan atau laporan dan *ability* yang berarti kemampuan. Akuntabilitas secara umum dapat diartikan suatu bentuk pertanggung jawaban. Organisasi yang *accountable* adalah organisasi yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil dan memungkinkan pihak luar mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan kreatif.

Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai kemampuan atau sikap menunjukan pertanggung jawaban atau laporan. Akuntabilitas menurut Mc. Ashan adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tugas atau tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.⁵⁸

Akuntabilitas merupakan kondisi dimana seseorang dinilai karena performanya dalam menyelesaikan tugas yang diamanahkan kepadanya dan dapat mempertanggung jawabkannya. Pertanggung jawaban tersebut bisa kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Dalam masalah pengelolaan keuangan sekolah agar dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan akuntabilitas maka hendaknya pengelola tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk

⁵⁸ Elfalassy, "Akuntabilitas Pendidikan, || [www.http://www.elfalassy88.wordpress.com](http://www.elfalassy88.wordpress.com) (2010).

mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang mengajukan dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan

adalah petugas yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat berharga lainnya.⁵⁹

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk melayani, memberikan ruang kepada pengamat independen yang memiliki hak untuk dapat melaporkan temuan atau informasi-informasi terkait dengan administrasi keuangan suatu organisasi.

Menurut E. Mulyana, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun anggaran sekolah dengan dikeluarkannya dana selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam rapat dewan sekolah yang diikuti oleh komponen sekolah, masyarakat dan pemerintah daerah.

Akuntabilitas dalam manajemen pembiayaan atau keuangan lembaga pendidikan berarti penggunaan uang lembaga pendidikan dapat

⁵⁹ Fajri Dwiayama, "Unsur Manajemen Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia," *Adaara : Manajemen Pendidikan Islam* 7 No. 1 (2018).

dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶⁰

Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk meyakinkan bahwa dana yang bersumber dari masyarakat ataupun sumber-sumber lainnya

dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.⁶¹ Dengan demikian akan dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sekolah. Jadi dapat dimengerti bahwa kepercayaan publik itu berbanding lurus dengan apa yang dilakukan oleh sekolah.

Kegunaan dan fungsi akuntabilitas sebagaimana yang disampaikan oleh Afid Burhanuddin antara lain yaitu :

- a. Akuntabilitas berfungsi untuk memberikan jaminan melalui evaluasi eksternal bahwa instansi dapat dinilai akuntabel bagi stakeholder.
- b. Akuntabilitas berfungsi untuk memastikan bahwa berbagai prinsip dan praktek yang ada di dalam organisasi atau instansi tidak tererosi atau habis oleh waktu dan ketinggalan jaman.
- c. Akuntabilitas berfungsi sebagai isyarat bahwa program yang telah digariskan telah berjalan sebagaimana mestinya.

⁶⁰ Rusdiana, *Pengelolaan Keuangan Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015). Hlm. 72

⁶¹ V Rivai dan Sylvina Murni, *Education Manajemen: Teori Dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

d. Akuntabilitas berfungsi sebagai evaluasi kualitas dari hasil program yang dilaksanakan.⁶²

Untuk mendapatkan akuntabilitas publik perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.
- 2) Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
- 3) Sekolah menyusun rencana pengembangan dan menyampaikan kepada publik/sakeholders disetiap awal tahun anggaran.
- 4) Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stikeholders.
- 5) Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan kepada publik pada akhir tahun.
- 6) Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau pengaduan publik.
- 7) Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
- 8) Memperbaharui rencana kinerja sebagai kesepakatan komitmen yang baru.

⁶² Afid Burhanuddin, *-Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan*
<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/01/17/>

Sedangkan menurut Shafratunnisa yang kutip oleh Arwildayanto bahwa ada empat pilar utama yang menjadi prasyarat terbagunnya akuntabilitas manajemen keuangan lembaga pendidikan: (1) adanya transparansi penyelenggara manajemen keuangan lembaga pendidikan dalam menerima sumber pembiayaan pendidikan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola dana lembaga pendidikan tersebut. (2) adanya standar kinerja pengelolaan keuangan lembaga pendidikan yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pembiayaan pendidikan, dan wewenangnya antara lain sebagai otorisator, ordonator dan bendaharawan, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pengelolaan keuangan lembaga dengan prosedur yang mudah, biaya murah dan pelayanan yang cepat, (4) regulasi pengelolaan keuangan yang memberikan kepastian hukum, maupun tatakelola sebagai rambu-rambu dalam menjalankan kebijakan publik memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal.⁶³

Akuntabilitas memerlukan aturan, ukuran atau kriteria atau standar evaluasi sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan atau kegiatan. Dengan begitu, akuntabilitas adalah suatu kondisi performa pelaksana kegiatan yang mampu berkerja dan dapat memberikan hasil kerja sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan bersama sehingga memberikan rasa puas pihak-pihak yang berkepentingan.

⁶³ Arwildayanto, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*.

Pelaksanaan prinsip manajemen pembiayaan yaitu akuntabilitas ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kepuasan publik/stakeholders terhadap layanan pendidikan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas terhadap sekolah atau instansi terkait. Dan untuk meningkatkan akuntabilitas ini dibutuhkan pengawasan publik dalam mengelola dana yang diperoleh dan dihimpun dari pemerintah, orang tua dan masyarakat.

Dilihat dari penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa akuntabilitas bukanlah akhir dari sistem penyelenggaraan manajemen pada sekolah, tapi sebagai faktor pendorong yang kemudian menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi publik yang lebih tinggi. Bahkan bisa dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan start atau titik awal untuk mempertahankan eksistensi sekolah di tengah-tengah masyarakat.

3) Ruang lingkup manajemen pembiayaan

Ruang lingkup kegiatan manajemen pembiayaan meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggung jawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah proses mempersiapkan keputusan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Perencanaan ini meliputi kegiatan memilih dan menghubungkan

fakta-fakta dan membuat asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perencanaan merupakan kegiatan yang sistematis, artinya kegiatan perencanaan itu meliputi beberapa tahapan kegiatan. Kegiatan yang telah dilakukan akan menjadi landasan bagi kegiatan berikutnya. Kegiatan ini menjadi panduan sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dapat sesegera mungkin untuk diketahui dan diatasi.

Kegiatan perencanaan pendidikan itu menghimpun sumber daya yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran dalam bentuk dana bagi komponen kegiatan. Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis sekolah sedikitnya mencakup dua hal yaitu menyusun anggaran sekolah (RAS) dan pengembangan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Kedua rencana ini harus disusun berimbang artinya rencana pendapatan dan pengeluaran atau belanja harus seimbang dan jangan sampai terjadi anggaran pendapatan minus.⁶⁴

Tujuan dari perencanaan pembiayaan pendidikan adalah antara lain :

1. Stadarat pengawasan, yaitu menyelaraskan antara pelaksanaan program dengan perencanaan program.

⁶⁴ Mulyasa, *“Manajemen Berbasis Sekolah.”* 82

2. Mengetahui pelaksanaan serta selesainya sebuah kegiatan.
3. Mendapatkan kegiatan yang sistematis dalam hal biaya dan kualitas pekerjaan.
4. Mengurangi adanya kegiatan-kegiatan yang kurang sesuai dengan tujuan.
5. Menghormati biaya dalam pelaksanaan kegiatan memberikan gambaran anggaran yang menyeluruh dalam kegiatan pendidikan.
6. Menghemat biaya.
7. Mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan proses kegiatan.
8. Mengarahkan kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tahapan dan prosedur dalam menyusun rencana pembiayaan pendidikan antara lain :

1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama tahun anggaran.
2. Mengidentifikasi sumber daya-daya (uang, jasa dan barang)
3. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran itu pada dasarnya adalah pernyataan finansial.
4. Memformulasikan anggaran ke dalam bentuk format yang telah disetujui atau diketahui oleh pihak yang berwenang.
5. Melaksanakan revisi usulan perencanaan anggaran pembiayaan pendidikan.

6. Persetujuan revisi usulan rencana anggaran.

7. Pengesahan anggaran.⁶⁵

Pemerintah telah memberikan otoritas / keleluasaan dan kewenangan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan kepada lembaga pendidikan dengan penerapan MBS (manajemen berbasis sekolah) dengan tujuan meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan pendidikan

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yaitu penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan.

1) Penerimaan

Penerimaan merupakan sumber dan uang yang dibutuhkan oleh sekolah baik dari intern sekolah seperti iuran siswa maupun bantuan dari luar seperti instansi pemerintah maupun swasta. Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

2) Pengeluaran

Dana uang diperoleh dari berbagai sumber dipergunakan secara efektif dan efisien. Setiap pengeluaran dana harus didasarkan pada kebutuhan yang telah direncanakan dalam pembiayaan pendidikan. Pengeluaran tersebut berkaitan dengan pembayaran keuangan sekolah tenaga

⁶⁵ N. Fatttah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).

administrasi, guru, bahan-bahan, perlengkapan dan fasilitas-fasilitas sekolah.

c. Evaluasi

Evaluasi di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian dibuatkan kesimpulan dan menyusun saran pada setiap tahap dari pelaksanaan program.⁶⁶

3) Pengembangan manajemen pembiayaan (*Konsep School Levy*)

Konsep school levy sebenarnya ditemukan dalam praktik manajemen pembiayaan pendidikan di Amerika. Pengertian umum school levy adalah sekolah yang mengandalkan sumber utama pembiayaan pendidikannya dari pajak.⁶⁷ Disebut levy karena merekrut atau mengambil dana dari pajak, sehingga sering juga disebut sebagai school tax levies atau sekolah yang mengambil dana pajak untuk memenuhi keperluan pendidikan. Dari pendapat Kranz tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap sekolah yang dalam penyelenggaraannya didukung oleh pajak maka bisa disebut sebagai school levy. Artinya konsep school levy dalam manajemen pembiayaan

⁶⁶ Arwildayanto, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*. 55

⁶⁷ Jones, omas H, (1985), *Introduction To School Finance Technique and Social Policy*, New York: McMillan Publishing Company. Jones, 1985, 5

pendidikan sesungguhnya berbicara dalam konteks sumber-sumber pembiayaan pendidikan.⁶⁸

Informasi tentang school levy juga bisa dilihat dalam ketetapan State School Levies Credit yang dikeluarkan Wisconsin Department of Revenue, Division of Research and Policy pada 3 Desember 2008, dengan apa yang disebut dengan State School Levies. Produk state school levies dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kredit pajak kekayaan ‘property tax’ untuk pertama kali dibayarkan pada tahun 1962/1963 untuk tahun pembayaran pajak bagi pajak kekayaan tanah dan bangunan serta pajak kekayaan pribadi (situs web Wisconsin Department Revenue: <http://dor.wa.gov>).⁶⁹

Konsep school levy muncul sebagai akibat pembagian antara dana pusat (Pemerintah Federal) dengan lokal (Pemerintah Distrik). Selama ini, pajak properti dikumpulkan sebagai sumber keuangan umum dan didistribusikan kepada sekolah-sekolah distrik melalui negara bagian dengan sejumlah pengaturan, sebagaimana dijelaskan dalam situs web Department of Revenue Washington State sebagai berikut:

“Property tax is the primary funding source for Washington’s public schools. Two types of property tax levies support the state school system: the state School levy paid by all Washington

⁶⁸ Umi Zulfa, -Strategi Pengembangan Madrasah Efektif Melalui Pengembangan Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah Berbasis Ziswa-School Levy, || *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3, no. 1 (2016): 129.

⁶⁹ Ibid.,

property owners for public schools; and special levies approved by voters for a specific school district.....Whereas revenues from special levies may only be used for that school district, all funds collected from the state property tax levy are deposited in the state's general fund. is money is distributed to school districts throughout the state on a set formula”.

Sebagai sebuah konsep yang sudah efektif dipraktikkan, menurut Cagnetti, school levy memiliki karakteristik sebagai berikut:⁷⁰

- a. Perekrutan/penarikan uang dari pajak untuk sekolah dilakukan setiap tahun, terutama penarikan pajak properti.
 - b. Terjadinya peningkatan penarikan sebesar 2 sampai 3 % akibat inflasi pada tahun sebelumnya.
 - c. Di lapangan terjadi peningkatan biaya operasional sekolah publik untuk taman kanak-kanak, pra sekolah, penasihat komputer, layanan kesehatan dan pelatihan guru.
 - d. Gaji menjadi kesepakatan besar atas perekrutan pajak.
 - e. Kenaikan gaji guru rata-rata naik 2,5 % sampai 5 % per tahun
- 4) Konsep Zizwa dalam manajemen pembiayaan

Jika di negara asal konsep school levy, sumber pembiayaan pendidikan berasal dari pajak terutama pajak property, maka jika diadopsi dan disesuaikan dengan karakteristik di Indonesia; di mana masyarakat mayoritas Islam berada bukan dalam negara Islam, yang implikasinya tidak hanya membayar pajak tetapi juga zakat dan lainnya, sedangkan pajak tidak dialokasikan secara khusus dari awal untuk

⁷⁰ Ibid,.

menjamin pendidikan yang bermutu, maka pajak tersebut bisa diganti dengan zakat, infak, shadaqah, wakaf dan lainnya.⁷¹ Apalagi dalam khasanah Islam, praktik ziswa sebagai sumber pembiayaan pendidikan juga bisa ditemukan misalnya pada masa kekhalifahan Islam abad IV H.⁷² Bahkan pada masa khalifah Umar dan Utsman, pembiayaan pendidikan seperti untuk memberi gaji kepada guru, muadzin dan imam sholat jama'ah, diambilkan dari pendapatan negara (Baitul Mal) yang berasal dari Hizyah, kharaj (pajak tanah), dan usyur (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara), demikian pendapat Rahman (1995), Azmi (2002) dan Muhammad (2002) dalam Al Jawi (2011).⁷³ Artinya pada masa sahabat sumber pembiayaan pendidikan bisa dari Hizyah, kharaj (pajak tanah), dan usyur (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara). Sehingga tidak heran pada masa abad ke IV H, kekhalifahan Islam telah mampu memberikan pendidikan gratis pada rakyatnya.

I. Pengembangan Sekolah

Pengembangan sekolah terdiri dari dua kata yaitu -pengembangan dan -sekolah. Kata -pengembangan berasal dari

⁷¹ Umi Zulfa, *Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat. Analisis School Levy*. Media Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam. Vol: XXVII, Nomor 2, 2012/1433. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunna Gunung Djai Bandung Bekerjasama dengan Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam (ASPI) Indonesia, 2012, 239-254

⁷² Khalid, Al Jawi, *-Pembiayaan Pendidikan dalam Islam*, 2008, dalam: <http://taukhid.wordpress.com>, diambil tanggal 1 februari 2011.

⁷³ M. Shiddiq, Al Jawi, *-Pembiayaan Pendidikan dalam Islam*, 2008, dalam: <http://taukhid.wordpress.com>, diambil tanggal 1 februari 2011.

kata -kembang yang berarti mekar terbuka atau membentang, menjadi besar dan menjadi tambah sempurna. Istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan atau aktivitas yang menghasilkan suatu alat atau cara baru, dimana dalam kegiatan tersebut dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dari sesuatu yang telah ada sebelumnya dan akhirnya cara tersebut atau alat tersebut yang telah dilakukan selama kegiatan berlangsung akan dipilih untuk dilakukan atau diterapkan. Sedangkan pengertian -sekolah adalah bangunan atau tempat untuk belajar. Jadi pengembangan sekolah merupakan salah satu wujud dari fungsi manajemen sekolah yang amat penting yang harus dimiliki sekolah.

Istilah pengembangan bisa berarti atau bermakna kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif bagaimana menjadikan lembaga pendidikan Islam menjadi lebih besar, merata dan luas pengaruhnya, sedangkan secara kuantitatif bagaimana menjadikan lembaga pendidikan Islam lebih baik, lebih beremutu, lebih maju dan berada di depan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, dapat dimengerti bahwa mulai sekarang setiap sekolah pada semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan harus memenuhi standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan. Salah satu upaya untuk mencapai SNP, setiap sekolah wajib membuat pengembangan sekolah.

Pengembangan sekolah harus dimiliki oleh setiap sekolah sebagai panduan dalam penyelenggaraan pendidikan baik itu untuk jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). SNP yang harus dicapai oleh setiap sekolah tersebut meliputi standar kelulusan, standar kurikulum, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan dan standar penilaian pendidikan.

Lembaga pendidikan yang berkualitas adalah lembaga yang mampu memenuhi sarana dan prasarana pendidikannya. Sarana yang lengkap seperti buku, alat belajar dan penyediaan sumber belajar seperti laboratorium, perpustakaan dan lainnya sangat dapat menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Demikian juga sekolah yang memiliki prasarana yang lengkap akan dapat memperlancar proses pembelajaran dan ujungnya dapat meningkatkan mutu pembelajaran.

Pengembangan lembaga pendidikan dalam disertasi ini membatsi diri dalam masalah pengembangan sarana dan prasarana dengan landasan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana penelitian disertasi ini dilakukan..

I. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Penegertian sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah.

Sarana dan prasarana merupakan alat yang vital dalam proses pendidikan dan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan. Sarana yang lengkap seperti buku teks, alat bantu belelajar mengajar, merupakan fasilitas belajar yang penting. ketersediaan sumber belajar yang lain seperti laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya akan dapat meningkatkan hassil belajar peserta didik, demikian juga dengan sarana prasarana yang lain.

Sarana dan prasarana yang ada di lembaga pendidikan harus dipenuhi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 menjelaskan tentang sarana prasarana ini ada dalam pasal 25, yaitu :

- a. Standar sarana prasarana merupakan kriteria minimal sarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- b. Sarana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan segala sesuatu yang dapat dipai alat dan perlengkapan dalam mencai tujuan pembelajaran.
- c. Prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.

Dalam pengembangan sarana dan prasarana diharapkan akan semakin meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran dan harus mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana yang telah

ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 pada pasal 25 ayat 4, yaitu:

- a. Menunjang pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan dan efektif.
- b. Menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan.
- c. Ramah terhadap penyandang disabilitas.
- d. Ramah terhadap kesehatan lingkungan.

Lembaga pendidikan atau sekolah harus melakukan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sampai pada pengembangan karena sekolah atau lembaga pendidikan yang paling mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana, baik itu meliputi cakupan, kesesuaian, maupun kemutakhiran, terutama sarana dan prasarana yang sangat erat kaitanya dengan proses belajar mengajar secara langsung.

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana di lembaga pendidikan didasarkan pada usulan kebutuhan dari warga sekolah atau lembaga pendidikan agar dapat melaksanakan tugas tanpa menemui kendala. Pengelolaan sarana dan prasarana ini meliputi : 1) kegiatan perencanaan, 2) pengadaan, 3) pengawasan, 4) penyimpanan inventarisasi dan penghapusan serta penataan.

Pengembangan sarana dan prasarana harus mengacu pada standar sarana prasarana berdasarkan Permen 244 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan

- a) Satu SMA/MA memiliki minimum 3 (tiga) rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.
- b) Satu SMA/MA dengan 3 (tiga) rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 (enam ribu) jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA baru.

2. Lahan

- 1). Memenuhi rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik.
- 2). Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lahan juga memenuhi ketentuan luas minimum.
- 3). Luas lahan adalah luas lahan yang dapat dipergunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/olahraga.
- 4). Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

- 5). Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada pada garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
- 6). Lahan terhindar dari gangguan-gangguan : pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara.
- 7). Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi dan mendapat izin pemanfaatan dari pemerintah setempat.
- 8). Lahan memiliki status hak tanah, dan atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

3. Bangunan Gedung

- 1). Memenuhi rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik (2m²/peserta didik).
- 2). Bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan yaitu memiliki struktur yang stabil dan kokoh, yang dilengkapi dengan sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
- 3). Pembangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan yaitu mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai, memiliki sanitasi didalam dan di luar gedung, bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

- 4). Bangunan gedung memiliki atau menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.
- 5). Bangunan gedung memnuhi persyaratan kenyamanan yaitu mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran, memiliki temperatur dan kelembaban yang melebihi kondisi luar ruangan, setiap ruangan dilengkapi lampu penerangan.
- 6).Gedung bangunan dilengkapi dengan sistem keamanan yaitu peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya, akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi petunjuk arah yang jelas.
- 7).Bangunan gedung dilengkapi instalasi listrik dengan daya 1300 watt.
- 8).Bangunan secara berkala dilakukan pemeliharaan baik ringan maupun berat.
- 9).Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kelengkapan Prasarana

Sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, geddung, ruang sirkulasi dan tempat bermain/olahraga.

J. Penelitian Terdahulu

1. Nikmawati Dalam Manajemen Pembiayaan Fasilitas Pendidikan Islam (Penelitian dei Sekolah Menengah Pertama (SMP) Juara Bandung dan SMP Al Ma'sum Bandung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis untuk menganalisa kebutuhan informasi mengenai manajemen pembiayaan pendidikan Islam khususnya berkaitan dengan fasilitas pendidikan dan dampaknya pada prestasi belajar. Selanjutnya teori yang digunakan adalah teori manajemen untuk *grand theory*, teori pembiayaan untuk *midle teori* dan teori prestasi belajar sebagai *aplicative theory*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : perencanaan pembiayaan fasilitas pendidikan, pelaksanaan pembiayaan fasilitas pendidikan, pengawasan pembiayaan fasilitas pendidikan, faktor pendukung dan penghambat pembiayaan fasilitas pendidikan dan dampak pembiayaan fasilitas pendidikan terhadap prestasi belajar di SMP Juara Bandung dan SMP Al Ma'sum Bandung.

Hasil dari penelitian ini antara lain : 1) SMP Juara dan SMP Al Ma'sum Bandung melakukan perencanaan pembiayaan fasilitas pendidikan secara

terstruktur dengan cara menentukan rencana anggaran, sumber dana, memformulasikan rencana anggaran, melakukan revisi usulan anggaran dan pengesahan anggaran; 2) pelaksanaan pembiayaan fasilitas pendidikan di kedua lembaga ini yaitu untuk pembiayaan fasilitas pendidikan berupa investasi bangunan yang dilaksanakan oleh yayasan dan yang berupa fasilitas media pembelajaran dilaksanakan oleh sekolah; 3) pengawasan pembiayaan fasilitas pendidikan dilakukan setiap bulan dengan cara menyerahkan pelaporan pertanggungjawaban ke yayasan; 4)

faktor pendukung pembiayaan fasilitas pendidikan yang ada di kedua sekolah tersebut adalah memperoleh dana BOS dari pemerintah, sedangkan faktor penghambat adalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah, keterlambatan atau tunggakan pembayaran dana dari orang tua siswa, pembiayaan fasilitas pendidikan tergantung pada kebijakan yayasan dan keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban; 5) pembiayaan fasilitas pendidikan di kedua sekolah ini memiliki dampak positif bagi prestasi belajar siswa.

2. Muhludin, dalam Akuntabilitas Kepala Madrasah dalam Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Swasta Propinsi Jambi.

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan model Creswell, S. Miles Huberman.

Tujuan ini bertujuan untuk melihat akuntabilitas kepala Madrasah dalam melaksanakan tugas mengatur pembiayaan pendidikan madrasah. Pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara baik dan benar karena merupakan kunci keberhasilan dalam suatu lembaga. Teori yang digunakan adalah petikan dari teori Akdon Matin, Wibowo, Heti Haryati, Tabrani Yusman. Teori tersebut penulis anggap tepat untuk mengelola pengelolaan pendidikan tersebut.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan : 1) Kepala MTs PKP Al Hidayah Kota Jambi belum maksimal melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan karena masih banyak persyaratan secara teori belum dikerjakan; 2) Kepala MTs Al Munawwarah Merangin juga belum secara sempurna dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan pembiayaan, karena secara teori masih ada yang belum dilaksanakan; 3) Kepala MTs Al Baiyatush Sholihat belum melaksanakan akuntabilitas pengelolaan pembiayaan secara sempurna karena masih ada yang menurut teori yang masih belum dilaksanakan.

3. Salamet Panuntun dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MA Al Irsyad Gajah Demak.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan bentuk kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan setelah data terkumpul dilakukan analisa data dengan tahapan reduksi, display dan verifikasi.

Permasalahan yang diteliti meliputi : a. Bagaimana perencanaan anggaran madrasah untuk meningkatkan mutu di MA Al Irsyad Gajah Demak ? b. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan madrasah untuk meningkatkan mutu di MA Al Irsyad Gajah Demak ? c. Bagaimana sistem evaluasi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu di MA Al Irsyad Gajah Demak ?

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Perencanaan anggaran madrasah untuk meningkatkan mutu di MA Al Irsyad Gajah Demak dilakukan dengan setiap guru mengajukan proposal sesuai dengan kebutuhan kemudian diserahkan ke WAKA dan WA di sampaikan kepada Kepala Madrasah dan diteruskan ke yayasan untuk disepakati dalam RAPBM tahunan, 2) pelaksanaan pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dilakukan dengan cara membagi setiap sektor pendidikan sesuai dengan kesepakatan rapat RAPBM secara efisien, efektif dan tepat guna, 3) Evaluasi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan dilakukan dengan dua cara, jika dana berasal dari pemerintah maka evaluasi langsung dilakukan oleh pemerintah melalui laporan pertanggungjawaban pihak sekolah ke kementerian terkait, jika dana berasal dari bantuan masyarakat, orang tua, siswa maka evaluasi langsung dilakukan oleh kepala madrasah dan yayasan dengan menggunakan e-bageting.

4. Rofiah Nurul Aini, 2017 dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MTs Satu Atap An Na'im Ajisoko Desa Majenang Sukodono Sragen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi .

Sumber data yang digunakan adalah : 1) kepala sekolah 2) Bendahara dan salah satu guru yang ada di MTs SA.

Dari hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa : a) sumber keuangan MTs SA hanya bersumber dari BOS dan infaq dari orang tua siswa, b) Perencanaan anggaran memiliki konsep tersendiri yaitu membuat atau menyusun RKAM pada awal tahun ajaran baru, c) Pelaksanaan anggaran MTs SA disesuaikan dengan RKAM yang telah disusun selama 1 tahun ke depan, d) Pengawasan anggaran MTs SA ada 2, yaitu pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pihak kemenag serta dari pihak yayasan yang dilaksanakan selama 6 bulan sekali dengan melakukan pengawasan penggunaan dan pelaksanaan dana BOS. Pengawasan internal , pengawasan yang dilakukan oleh pihak komite dan yayasan. Pengawasan ini dilakukan dengan cara pihak sekolah atau madrasah menyampaikan laporan ke yayasan dan komite.

5. Samiyah, 2015, dalam Manajemen Pembiayaan dalam Mutu Pendidikan Di Universitas Islam Malang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif analitis.

Metode yang dipergunakan dalam pmengumpulkan data adalah observasi, wawancara dan dokumntasi. Tenik analisa data menggunakan medel analisis

interaktif Miles dan Huberman yang mencakup empat komponen yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan *kredebelitas*, *transferbility*, *dependebilitas* dan *konfirmabilitas*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan mengetahui : 1) Perencanaan anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Islam Malang, 2) Strategi pemenuhan anggran untuk meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Islam Malang, 3) Evaluai anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Islam Malang.

Hasil dari penelitan ini dapa tdisimpulkan : 1) perncanaan anggaran pendidikan UNISMA disusun dan dituangkan dallam bentuk RAPBPT yang diadakan tiap akhir tahun dengan mentapkan semua program serta anggran masing-masing program. Melibatkan stikeholders kampus, melalui rapat serta keputusan rapat yang sudah disepakati diputuskan lagi oleh ketua yayasan, 2) Strategi pemenuhan anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di UNISMA yaitu

: a. Strategi unit kerja mandiri, b. sumbangan dana dari yayasan dan mahasiswa, c. memiliki link dengan luar negeri dan d. pengajuan proposal kepada pemerintah. 3) Evaluasi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di UNISMA dilakukan melalui : a. Evaluasi program

dilakukan per satu semester atau setahun, b. Evaluasi hasil kerja pegawai, c. Evaluasi mekanisme organisasi, d. Evaluasi hasil analisa internal dan eksternal.

Orsinilitas penelitian terletak pada Manajemen Pembiayaan Dalam Mengembangkan Lembaga pendidikan, dimana manajemen pembiayaan ini lebih terfokus pada prinsip manajemen pembiayaan, pelaksanaan manajemen pembiayaan dan pengembangan manajemen pembiayaan, sehingga melalui proses manajemen pembiayaan tersebut lembaga pendidikan dapat mengembangkan sarana prasarana yang ada di sekolahan.

6. Mukhlisoh Rifdatul, 2020, dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Di MA Darul Khairat Kota Pontianak Kalimantan Barat.

Biaya pendidikan menjadi salah satu pendukung dalam meningkatkan prestasi siswa.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: 1) mendiskripsikan dan menganalisis peningkatan prstasi belajar siswa di MA Darul Khairat kota Pontianak, 2) mendiskripsikan dan menganalisis manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan prestasi siswa, 3) mendistkripsikan dan manganalisis implikasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan prestasi siswa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang diambil melalui subyek, kepala sekolah, dan bendahara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan cara reduksi data yang tidak relevan, memaparkan data dan menarik kesimpulan.

Dari penelitian yang telah dilakukan telah menemukan realitas bahwa : 1) adanya peningkatan prestasi siswa di setiap tahunnya karena adanya dukungan dari pembiayaan pendidikan. 2) manajemen pembiayaan pendidikan memperoleh dana dari BOS, 3) implikasi manajemen pembiayaan pendidikan sangat terlihat dengan adanya prestasi—prestasi di setiap tahunnya.

7. Sasongko, 2017, dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan (studi Multi situs SMA Negeri 1, SMA Negeri 3 dan SMA 5 Malang.

Pembiayaan pendidikan merupakan alternatif investasi yang menguntungkan bagi bagi suatu bangsa. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan sumber-sumber pembiayaan pendidikan perencanaan pembiayaan pendidikan pelaksanaan pembiayaan dan pelaporan pembiayaan pendidikan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan

rancangan studi multisitus dengan metode analisis deskripsi induktif

terhadap fakta-fakta dan temuan dalam praktik manajemen pembiayaan yang dilakukan di tiga sekolah menengah atas negeri yakni SMA Negeri 1 SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam observasi dan dokumentasi. Analisis

data dilakukan dalam dua tahap yaitu analisis data situs individu dan analisis data lintas situs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama sumber-sumber pembiayaan pendidikan berasal dari tiga sumber pembiayaan pendidikan yaitu pemerintah (biaya operasional sekolah dan bantuan blockgrant) orang tua atau wali siswa (sumbangan pembinaan pendidikan sumbangan biaya pengembangan pendidikan dan donasi) dan masyarakat (donasi alumni corporate social responsibility sponsor). Kedua perencanaan pembiayaan pendidikan disusun dan tertuang dalam RKAS dilakukan setiap akhir tahun pelajaran sesuai delapan standar nasional pendidikan dan melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Tahap perencanaan pembiayaan pendidikan antara lain persiapan pembekalan/lokakarya pengajuan dana peninjauan kembali perbaikan penyusunan program penganggaran dan pengesahan oleh komite sekolah. Ketiga

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi perolehan sumber-sumber pembiayaan pendidikan dan membelanjakan sumber-sumber pembiayaan.

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif akibat perubahan kebijakan dan kondisi keuangan sekolah. Efisiensi pelaksanaan pembiayaan pendidikan dilaksanakan dilakukan dengan membelanjakan sumber pembiayaan sesuai kebutuhan. Keempat pelaporan pembiayaan pendidikan belum sepenuhnya transparan karena hanya dipublikasi secara terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan sekolah lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan pendidikan merencanakan pembiayaan pendidikan dengan melibatkan seluruh stakeholder melaksanakan pembiayaan pendidikan secara efektif dan efisien dan menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

8. Ahmad Mushthofa, 2022, dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Bebas Sumbangan Pembiayaan Pendidikan. Pendidikan berkualitas merupakan harapan bagi seluruh elemen pendidikan. Harapan tersebut merupakan investasi mahal yang harus didukung dengan pembiayaan yang menunjang. Tujuan

penelitian mengkaji manajemen pembiayaan pendidikan berbasis bebas sumbangan pembinaan pendidikan. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program manajemen

pendanaan pendidikan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pendekatan Ethologi Kemanusiaan. Subjek penelitian berjumlah 3 orang, kepala sekolah, pengawas manajerial, guru dan tenaga administrasi pendidikan. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan uji validitas dengan menggunakan teknik triangulasi sumber yang dilaksanakan dengan cara membandingkan informasi berbagai sumber dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan berbasis bebas sumbangan pembinaan pendidikan di SMK Cendekia Madiun dilakukan dengan cara mengelola manajemen pembiayaan, berdasarkan 3 langkah metode konseptual manajemen pembiayaan pendidikan. Tahapan pertama yakni perencanaan dengan melakukan penyusunan RKaS. Tahapan kedua yakni pengaplikasian dengan pengelolaan

penerimaan dana dari BOS, BPOPP, serta UNIPMA, dan pengelolaan hasil unit usaha sebagai sumber dana pendidikan lain. Tahapan ketiga yakni pengawasan dengan membentuk tim SPI (Sistem Pengendalian Intern), melakukan pelaporan berupa LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), serta melakukan pengecekan 3 bulan sekali.

9. Inggit Hascaryani, 2020, dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan Yang Bersumber Dari Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Mencapai Tujuan Sekolah di SMP Negeri Ceper.

Salah satu pembiayaan pendidikan adalah bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pembiayaan BOS dalam rangka mencapai tujuan sekolah SMP Negeri 1 Ceper dan menjelaskan bagaimana kendala yang muncul dalam yang penggunaan BOS di SMP Negeri 1 Ceper.

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara BOS, petugas kepegawaian staff TU, komite sekolah dan guru. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan metode triangulasi teknik dan sumber. Data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan

dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam manajemen pembiayaan dana BOS di SMP Negeri 1 Ceper Klaten baik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan dana BOS telah sesuai standar pembiayaan pendidikan dan petunjuk teknis BOS sehingga sekolah dapat mencapai tujuan sekolah. Kendala yang muncul dalam manajemen pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 1 Ceper yaitu: (1) keterlambatan pencairan dana BOS disolusi dengan menggunakan dana talangan dari koperasi sekolah atau dari rekanan yang menyediakan barang belanja; (2) Kebutuhan atau kegiatan sekolah yang tidak dapat dibiayai dana BOS disolusi dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat; (3) tidak adanya tenaga administrasi yang berstatus PNS sehingga yang menjadi bendahara BOS adalah guru yang kurang memahami administrasi keuangan disolusi dengan Bimtek pengelolaan dana BOS.

10. Didik Purwanto, 2020, dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dengan Model Partisipasi Orang Tua Asuh di SMA Nahdlatul Ulama' 01 Kabupaten Bondowoso.

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen masukan instrumental dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan dan pembiayaan pendidikan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan.

Tujuan penelitian ini adalah 1. Bagaimana transparansi pembiayaan pendidikan di SMA NU 01 Kab. Bondowoso, 2. Bagaimana akuntabilitas pembiayaan pendidikan di SMA NU 01 Kab, Bondowoso, 3. Bagaimana efektifitas pembiayaan pendidikan di SMA NU 01 Kab. Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Study Kasus, Teknik pengumpulan data yang di gunakan (1) Observasi semi partisipan, (2) Wawancara semi terstruktur, dan (3) dokumentasi. Sedangkan analisis

data menggunakan model intraktif Miles Huberman dan Saldana dengan langkah-langkah : (1) pengumpulan data, (2) Kondensasi data, (3) penyajian data dan, (4) penarikan kesimpulan. Untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Dalam penelitian ini adalah :1). Transparansi keuangan pembiayaan pendidikan dari orang tua asuh ke siswa asuh terlaksana dengan baik, sistematis dan memenuhi persyaratan pelaporan keuangan. Pelaporan tidak hanya dimiliki oleh pihak sekolah, namun juga diumumkan kepada publik, kepala sekolah diadakan rapat walid murid dan seluruh guru bersama pihak komite guna memberikan laporan secara langsung kepada pihak komite mengawal pelaporan pembiayaan pendidikan ini demi memelihara kepercayaan stakeholder. 2). Akuntabilitas

keuangan pembiayaan SMA NU 01 Bondowoso kepala sekolah memberikan tanggungjawab khusus kepada salah satu bagian keuangan sekolah untuk mengelola pembiayaan pendidikan tersebut dan tidak dijadikan satu dengan pelaporan keuangan dari pos lainnya. Hal ini menjadi satu sisi positif karena pihak sekolah tidak mengambil dana dari orang tua asuh untuk kebutuhan sekolah, melainkan langsung disalurkan kepada siswa asuh. Demikian pula, siswa asuh dapat menjalankan kewajibannya sebagai peserta didik untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik. 3). Pembiayaan pendidikan dengan model orang tua asuh ini sangatlah efektif dalam menjamin keberlangsungan siswa asuh dalam menyelesaikan pendidikannya. Pihak sekolah juga mendukung dengan menyusun Rancangan Anggaran Belanja bagi siswa asuh setiap tahunnya, Efektifitas yang terbangun juga menjadikan bukti nyata bahwa pembiayaan pendidikan dengan kepercayaan yang penuh dari masyarakat dan stakeholder yang ada. Bahkan pihak komite sangat mengapresiasi dan selalu mengingatkan pihak sekolah untuk mempertahankan model pembiayaan ini.

11. Pipin Desniati, 2019, dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor.

Penulis menguraikan tentang diskripsi manajemen pembiayaan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan berhasil menemukan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, dari aspek implementasi perencanaan sistem manajemen pembiayaan pendidikan, kebijakan sistem pembiayaan pada Pondok Pesantren Darul Muttaqien dirancang oleh pimpinan pondok pesantren yang terdiri dari ketua yayasan, wakil pimpinan pondok, dan bendahara pondok. Kedua, aspek pelaksanaan sistem pembiayaan Pondok Pesantren Darul Muttaqien mulai berlaku sejak tahun ajaran 2018-2019. Ketiga, aspek evaluasi. Saat ini masih memiliki berapa kendala diantaranya; 1) kurangnya sosialisasi penggunaan sistem dari manual ke online, 2) kurangnya pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan sistem pembiayaan, 3) kurangnya perangkat yang menunjang sistem pembiayaan. Dengan demikian tesis ini mendukung pandangan George R. Terry tentang fungsi manajemen terkait dengan sistem pembiayaan pendidikan. Terkait dengan implementasi sistem pembiayaan pendidikan maka terdapat

tiga komponen yang harus bekerja secara efektif dan efisien. Ketiga komponen tersebut adalah perencanaan (planning), pelaksanaan (actuating), dan penilaian (evaluation).

12. Nur Faizah, 2020, dalam Sumber Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Santri (Studi Multi Situs Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Dan Pndok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet).

Penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam tentang manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu santri tujuan dari penelitian ini yaitu : 1) untuk mengungkapkan rencana sumber pembiayaan pendidikan di Pndok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet, 2) untuk mengungkapkan implementasi pembiyaan di Pndok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet, 3) Untuk mengungkapkan implementasi sumber pembiayaan dalam meningkatkan mutu santri di Pndok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis rancangan multisitus. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara : wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Untuk analis data menggunakan tehnik deskripsi yang penerapannya dalam tiga alur kegiatan, yaitu rreduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu santri diperoleh dari : 1) perencanaan sumber pembiayaan pendidikan yang baik yang dimiliki pesantren, 2) Implementasi yang efektif, efisien, transparan dan terbuka dalam perencanaan sumber pembiayaan yang ada, 3) Implikasi dari sumber pembiayaan yang telah ada dalam meningkatkan mutu santri, sehingga semakin baik sumber pembiayaan yang dimiliki pesantren, maka akan semakin baik kualitas lulusan pesantren atau mutu santri.

13. Zayyinun Munirah, 2020, dalam Manajemen Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan Pondok Pesantren Mandiri (studi Kasus di Pondok Pesantren Cindekia Darul Lutviah Murni NW Alkmel Lombok Timur).

Masalah keuangan selalu menjadi kendala di dalam pengelolaan pondok pesantren maka dari itu dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik agar menjadi pesantren yang mandiri dan memiliki lulusan yang berkualitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen pengelolaan keuangan, implikasi manajemen pengelolaan keuangan dan tantangan manajemen pengelolaan keuangan di pondok pesantren Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik

wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan pengambilan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Dari hasil analisis data dapat diperoleh temuan-temuan sebagai berikut: (1) Manajemen pengelolaan keuangan meliputi (a) perencanaan, dilakukan setiap tahun dengan melibatkan pengurus pesantren, dewan guru, komite sekolah dan perwakilan dari wali santri, (b) pengorganisasian, dilakukan dengan merancang program dan

menunjuk SDM yang kompeten di bidangnya, (c) pelaksanaan, dilakukan dengan menentukan sumber pendapatan dan pengalokasian dana. (d) pengawasan, dilakukan dengan mewajibkan setiap lembaga yang berada di bawah yayasan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan. (2) implikasi manajemen pengelolaan keuangan yaitu kesejahteraan rohaniyah dan material bagi guru, meningkatnya fasilitas pesantren, dan tingginya minat santri untuk melanjutkan pendidikan di pondok pesantren Cendekia (3) Tantangan manajemen pengelolaan keuangan diantaranya: perkembangan teknologi informasi,

berkembangnya usaha masyarakat, banyak didirikannya pondok pesantren, dan terjadinya persaingan antar pondok pesantren.

14. Hafidatul Mufasiroh, 2022, dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Sarana Prasarana Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Amanatulloh Gambiran Banyuwangi. Fokus penelitian ini : 1. Bagaimana proses penyusunan anggaran dalam meningkatkan sarana prasarana di SMP Amanatulloh Gambiran Banyuwangi ? 2. Bagaimana proses pembukuan pembiayaan dalam meningkatkan sarana prasarana di SMP Amanatulloh Gambiran Banyuwangi? 3. Bagaimana proses audit dalam meningkatkan sarana prasarana di SMP Amanatulloh Gambiran Banyuwangi? Tujuan penelitian ini : 1. Untuk mendeskripsikan proses penyusunan anggaran dalam meningkatkan sarana prasarana di SMP Amanatulloh Gambiran Banyuwangi. 2. Untuk mendeskripsikan proses pembukuan pembiayaan dalam meningkatkan sarana prasarana di SMP Amanatulloh Gambiran Banyuwangi. 3. Untuk mendeskripsikan proses audit dalam meningkatkan sarana prasarana di SMP Amanatulloh Gambiran Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mendeskripsikan dan menganalisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan, 1. Observasi partisipan, 2. Wawancara mendalam, dan 3. Studi dokumentasi. Hasil temuan yang peneliti temukan

dalam penelitian ini berupa strategi pembiayaan pendidikan di SMP Amanatulloh Gambiran Banyuwangi dalam meningkatkan sarana prasarana, manajemen pembiayaan sekolah menggunakan tiga strategi berikut: 1. Budgeting (perencanaan pembiayaan) 2. Accounting (pembukuan pembiayaan) 3. Auditing (pemeriksaan pembiayaan). Perencanaan pembiayaan yang sudah disepakati tim manajemen, tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam merencanakan pembiayaan pendidikan sekolah, antara anggaran yang masuk dan anggaran yang keluar harus sesuai, dalam hal ini dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan biaya sekolah (RAPBM) yang merupakan anggaran menyeluruh yang diperoleh sekolah baik itu dari BOS, SPP, dan bantuan yang lain. Setelah perencanaan RAPBM kemudian membuat rencana kegiatan anggaran madrasah (RKAM) yang dilaksanakan oleh bendahara sekolah. Keefektifan pembiayaan di SMP Amanatulloh Gambiran Banyuwangi menggunakan tiga strategi yaitu: mekanisme perencanaan anggaran, menghitung anggaran yang dibutuhkan, dan pelaksanaan pembiayaan.

15. Hinggil Permana, 2017, dalam Manajemen Pembiayaan di Lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Studi Kasus di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi).

Pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan saling keterkaitan pada setiap komponennya yang memiliki rentang mulai dari yang bersifat mikro hingga makro. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan meliputi sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, dan akuntabilitas hasilnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) latar alamiah PTKIS 2) perencanaan pembiayaan, 3) pengorganisasian pembiayaan, 4) pelaksanaan pembiayaan, 5) pengawasan pembiayaan di sebuah lembaga perguruan tinggi keagamaan Islam swasta studi kasus di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan terakhir membuat simpulan. Penelitian ini menghasilkan : 1) Latar alamiah pembiayaan di STAI Sukabumi sebagian besar bersumber dari mahasiswa dan bantuan yayasan. 2) Perencanaan pembiayaan mencakup dua tahapan utama yaitu penyusunan RAPB STAI Sukabumi dan pengembangan RAPB STAI Sukabumi. 3) dalam pengorganisasian pembiayaan, ketua STAI Sukabumi sebagai penanggungjawab atas pelaksanaan pembiayaan yang berada di

bawah kendali yayasan, selanjutnya penyebaran dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bendahara dan penanggung jawab kegiatan.

4) pelaksanaan pembiayaan di STAI Sukabumi terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang berjalan sesuai dengan prosedur atau standarisasi yang mengacu pada RAPB STAI Sukabumi yang semuanya diarahkan untuk peningkatan mutu dalam membiayai dan mengembangkan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pengelolaan kegiatan pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, implementasi sistem penilaian dan penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi. 5) pengawasan pembiayaan di STAI Sukabumi dilakukan oleh pihak internal yaitu ketua STAI Sukabumi dan pihak yayasan mulai dari pendapatan sampai pengeluaran pembiayaan.

16. Lisnawati, 2019, dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Mubtadin Islam Kendal Ngawi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) bagaimana penganggaran pembiayaannya, 2) bagaimana bentuk pembukuannya, 3) bagaimana sistem pengawasannya dan 4) bagaimana efektifitas dalam program yang dijalankan.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yang berbentuk kualitatif (natural setting) dengan teknik pengumpulan data berupa

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tahapan reduksi, display dan verifikasi. Kemudian Uji keabsahan data menggunakan uji triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penganggaran di sekolah tersebut yaitu menentukan rencana anggaran, menentukan sumber dana, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS), serta pengesahan anggaran. 2) Pembukuan menggunakan dua jenis kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. Metode yang digunakan adalah akrual basis. Model pembukuan yaitu model fishbone. Sedangkan jenis buku yang digunakan yaitu buku kas umum, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal dan buku pengeluaran internal. 3) Pengawasan dilakukan dua arah yaitu pengawasan internal dan eksternal. 4) keefektifitasnya dikatakan feasible dengan nilai ROI 4,32 atau 4,32%.

17. Nur Faizah, 2020, dalam Sumber Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Santri (Studi Multi Situs Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Dan Pndok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet). Penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam tentang manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu santri tujuan dari

penelitian ini yaitu : 1) untuk mengungkapkan rencana sumber pembiayaan pendidikan di Pndok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet, 2) untuk mengungkapkan implementasi pembiyaan di Pndok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet, 3) untuk mengungkapkan implementasi sumber pembiayaan dalam meningkatkan mutu santri di Pndok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis rancangan multisitus. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara : wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Untuk analis data menggunakan tehnik deskripsi yang penerapannya dalam tiga alur kegiatan, yaitu rreduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu santri diperoleh dari : 1) perencanaan sumber pembiayaaan pendidikan yang baik yang dimiliki pesantren, 2) Implementasi yang efektif, efisien, tranparan dan terbuka dalam perencanaan sumber pembiayaaan yang ada, 3) Implikasi dari sumber pembiayaan yang telah ada dalam meningkatkan mutu santri, sehingga semakin baik sumber

pembiayaan yang dimiliki pesantren, maka akan semakin baik kualitas lulusan pesantren atau mutu santri.

18. Zayyinun Munirah, 2020, dalam Manajemen Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan Pondok Pesantren Mandiri (studi Kasus di Pondok Pesantren Cindekia Darul Lutviah Murni NW Alkml Lombok Timur).

Masalah keuangan selalu menjadi kendala di dalam pengelolaan pondok pesantren maka dari itu dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik agar menjadi pesantren yang mandiri dan memiliki lulusan yang berkualitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen pengelolaan keuangan, implikasi manajemen pengelolaan keuangan dan tantangan manajemen pengelolaan keuangan di pondok pesantren Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan pengambilan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Dari hasil analisis data dapat diperoleh temuan-temuan sebagai berikut: (1) Manajemen pengelolaan keuangan meliputi (a) perencanaan, dilakukan setiap tahun dengan melibatkan

pengurus pesantren, dewan guru, komite sekolah dan perwakilan dari wali santri, (b) pengorganisasian, dilakukan dengan merancang program dan menunjuk SDM yang kompeten di bidangnya, (c) pelaksanaan, dilakukan dengan menentukan sumber pendapatan dan pengalokasian dana. (d) pengawasan, dilakukan dengan mewajibkan setiap lembaga yang berada di bawah yayasan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan. (2) implikasi manajemen pengelolaan keuangan yaitu kesejahteraan rohaniyah dan material bagi guru, meningkatnya fasilitas pesantren, dan tingginya minat santri untuk melanjutkan pendidikan di pondok pesantren Cendekia (3) Tantangan manajemen pengelolaan keuangan diantaranya: perkembangan teknologi informasi, berkembangnya usaha masyarakat, banyak didirikannya pondok pesantren, dan terjadinya persaingan antar pondok pesantren.

19. Hafidatul Mufasiroh, 2022, dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Sarana Prasarana Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Amanatulloh Gambiran Banyuwangi. Fokus penelitian ini : 1. Bagaimana proses penyusunan anggaran dalam meningkatkan sarana prasarana di SMP Amanatulloh Gambiran Banyuwangi ? 2. Bagaimana proses pembukuan pembiayaan dalam meningkatkan sarana prasarana di SMP Amanatulloh Gambiran Banyuwangi? 3. Bagaimana proses audit

dalam meningkatkan sarana prasarana di SMP Amanatulloh Gambiran Banyuwangi? Tujuan penelitian ini : 1. Untuk mendeskripsikan proses penyusunan anggaran dalam meningkatkan sarana prasarana di SMP Amanatulloh Gambiran Banyuwangi. 2. Untuk mendeskripsikan proses pembukuan pembiayaan dalam meningkatkan sarana prasarana di SMP Amanatulloh Gambiran Banyuwangi. 3. Untuk mendeskripsikan proses audit dalam meningkatkan sarana prasarana di SMP Amanatulloh Gambiran Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mendeskripsikan dan menganalisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan, 1. Observasi partisipan, 2. Wawancara mendalam, dan 3. Studi dokumentasi. Hasil temuan yang peneliti temukan dalam penelitian ini berupa strategi pembiayaan pendidikan di SMP Amanatulloh Gambiran Banyuwangi dalam meningkatkan sarana prasarana, manajemen pembiayaan sekolah menggunakan tiga strategi berikut: 1. Budgeting (perencanaan pembiayaan) 2. Accounting (pembukuan pembiayaan) 3. Auditing (pemeriksaan pembiayaan). Perencanaan pembiayaan yang sudah disepakati tim manajemen, tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam merencanakan pembiayaan pendidikan sekolah, antara anggaran yang masuk dan anggaran yang keluar harus sesuai, dalam

hal ini dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan biaya sekolah (RAPBM) yang merupakan anggaran menyeluruh yang diperoleh sekolah baik itu dari BOS, SPP, dan bantuan yang lain. Setelah perencanaan RAPBM kemudian membuat rencana kegiatan anggaran madrasah (RKAM) yang dilaksanakan oleh bendahara sekolah. Keefektifan pembiayaan di SMP Amanatulloh Gambiran Banyuwangi menggunakan tiga strategi yaitu: mekanisme perencanaan anggaran, menghitung anggaran yang dibutuhkan, dan pelaksanaan pembiayaan.

20. Hinggil Permana, 2017, dalam Manajemen Pembiayaan di Lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Studi Kasus di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi).

Pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan saling keterkaitan pada setiap komponennya yang memiliki rentang mulai dari yang bersifat mikro hingga makro. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan meliputi sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, dan akuntabilitas hasilnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) latar alamiah PTKIS 2) perencanaan pembiayaan, 3) pengorganisasian pembiayaan, 4) pelaksanaan pembiayaan, 5) pengawasan pembiayaan di sebuah lembaga

perguruan tinggi keagamaan Islam swasta studi kasus di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan terakhir membuat simpulan. Penelitian ini menghasilkan : 1) Latar alamiah pembiayaan di STAI Sukabumi sebagian besar bersumber dari mahasiswa dan bantuan yayasan. 2) Perencanaan pembiayaan mencakup dua tahapan utama yaitu penyusunan RAPB STAI Sukabumi dan pengembangan RAPB STAI Sukabumi. 3) dalam pengorganisasian pembiayaan, ketua STAI Sukabumi sebagai penanggungjawab atas pelaksanaan pembiayaan yang berada di bawah kendali yayasan, selanjutnya penyebaran dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bendahara dan penanggung jawab kegiatan. 4) pelaksanaan pembiayaan di STAI Sukabumi terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang berjalan sesuai dengan prosedur atau standarisasi yang mengacu pada RAPB STAI Sukabumi yang semuanya diarahkan untuk peningkatan mutu dalam membiayai dan mengembangkan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pengelolaan kegiatan pembelajaran, standar

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, implementasi sistem penilaian dan penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi. 5) pengawasan pembiayaan di STAI Sukabumi dilakukan oleh pihak internal yaitu ketua STAI Sukabumi dan pihak yayasan mulai dari pendapatan sampai pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3.8

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Nikmawati , Manajemen Pembiayaan Fasilitas Pendidikan Islam (Penelitian di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Juara Bandung dan SMP Al Ma'sum Bandung	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, SMP Juara dan SMP Al Ma'sum Bandung melakukan perencanaan pembiayaan fasilitas pendidikan secara terstruktur dengan cara menentukan rencana anggaran, sumber dana, memformulasikan rencana anggaran, melakukan revisi usulan anggaran dan pengesahan anggaran. Kedua, pelaksanaan pembiayaan fasilitas pendidikan di kedua sekolah tersebut berupa investasi bangunan yang	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Nikmawati adalah manajemen pembiayaan fasilitas pendidikan Islam sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada penerapan prinsip manajemen pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan dibatasi pada sarana dan prasarana.

		<p>dilaksanakan oleh yayasan dan yang berupa fasilitas media pembelajaran dilaksanakan oleh sekolah. Ketiga, Pengawasan pembiayaan fasilitas pendidikan dilakukan setiap bulan dengan cara menyerahkan pelaporan pertanggungjawaban ke yayasan. Keempat, Faktor pendukung pembiayaan fasilitas pendidikan yang ada di kedua sekolah tersebut mendapatkan BOS dari pemerintah dan faktor penghambatnya adalah keterlambatan pencairan bantuan dari pemerintah dan dari orang tua mempengaruhi pertanggungjawaban ke yayasan. Kelima, pembiayaan fasilitas pendidikan di kedua sekolah memiliki dampak positif bagi prestasi belajar siswa.</p>	
2	<p>Mahluddin, Akuntabilitas kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, Kepala MTs PKP Al Hidayah kota Jambi belum maksimal melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan</p>	<p>Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Mahluddin adalah Akuntabilitas kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan</p>

	Madrasah Tsanawiyah swasta propinsi Jambi	karena masih banyak persyaratan secara teori belum dikerjakan. Kedua, Kepala MTs Al Munawwarah Maringin juga belum secara sempurna dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas demikian juga MTs Al Baiyatush Sholihat belum melaksanakan prinsip akuntabilitas pengelolaan pembiayaan secara sempurna karena karena masih ada secara teori yang belum dilaksnakan.	sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada penerapan prinsip manajemen pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan dibatasi pada sarana dan prasarana
3	Salamat Panuntun, Manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Al Irsyad Gajah Demak	Hasil dari penelitian ini antara lain : Pertama, Perencanaan anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan dilakukan dengan cara setiap guru mengajukan proposal sesuai dengan kebutuhan dan disepakati dalam RAPBM tahunan. Kedua, Pelaksanaan pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dilakukan dengan cara membagi setiap sektor pendidikan sesuai dengan kesepakatan rapat RAPBM secara efektif, efisien dan tepat guna. Ketiga, Evaluasi pembiayaan pendidikan dilakukan dengan dua cara, yaitu bila dana berasal dari	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Salamet Panuntun adalah manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada penerapan prinsip manajemen pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan dibatasi pada sarana dan prasarana

		pemerintah maka evaluasi dilakukan oleh kementerian terkait dan bila dana berasal dari bantuan masyarakat, orang tua siswa maka evaluasi dilakukan langsung oleh kepala sekolah dan yayasan.	
4	Rofiah Nurul Aini, Manajemen pembiayaan pendidikan di MTs Satu Atap An Naim Ajisoko Desa Majenang Sukodono Sragen	Hasil penelitian menunjukkan : Pertama, Sumber keuangan MTs SA hanya bersumber dari BOS dan infaq dari orang tua siswa. Kedua, Perencanaan anggaran memiliki konsep tersendiri yaitu menyusun RKAM pada awal tahun ajaran. Ketiga, Pelaksanaan anggaran MTs SA disesuaikan dengan RKAM yang telah disusun selama 1 tahun ke depan. Keempat, pengawasan dilakukan oleh Kemenag dan yayasan yang dilaksanakan selama enam bulan sekali.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Rofish Nurul Aini adalah manajemen pembiayaan pendidikan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada penerapan prinsip manajemen pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan dibatasi pada sarana dan prasarana
5	Samiyah, Manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Islam Malang	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan : Pertama, perencanaan anggaran UNISMA disusun dan dituangkan dalam bentuk RAPBPT yang diadakan setiap akhir tahun dengan menetapkan semua program serta anggaran masing-masing program dengan melibatkan stikeholders kampus melalui keputusan rapat yang sudah disepakati	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Samiyah adalah manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada penerapan prinsip manajemen pembiayaan dalam mengembangkan

		<p>dan diputuskan oleh ketua yayasan. Kedua, Strategi pemenuhan anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di UNISMA yaitu : a. Strategi unit kerja mandiri, b. sumbangan dana dari yayasan dan mahasiswa, c. Memiliki link dengan luar negeri, d. pengajuan proposal kepada pemerintah. Ketiga, Evaluasi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan dilakukan melalui: a. Evaluasi program dilakukan per semester atau setahun, b. evaluasi hasil kerja pegawai, c. Evaluasi mekanisme organisasi, d. Evaluasi hasil analisa internal dan eksternal.</p>	<p>lembaga pendidikan dan dibatasi pada sarana dan prasarana</p>
6	<p>Mukhlisoh Rifdatul, Manajemen pembiayaan pendidikan dalam peningkatan prestasi belajar siswa di MA Darul Khairat kota Pontianak Kalimantan Barat</p>	<p>Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa :: Pertama, Adanya peningkatan prestasi siswa setiap tahunnya karena adanya dukungan dari pembiayaan pendidikan. Kedua, Pembiayaan pendidikan bersumber dari BOS. Ketiga, implikasi manajemen pembiayaan pendidikan sangat terlihat dengan adanya prestasi-prestasi di setiap tahunnya.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlisoh Rifdatul adalah manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada penerapan prinsip manajemen pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan dibatasi pada sarana dan</p>

			prasarana
7	Sasongko, Manajemen pembiayaan pendidikan (studi multi situs di SMA Negeri 1, SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Malang	Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa: Pertama, sumber pembiayaan pendidikan berasal dari tiga sumber yaitu : dari pemerintah (BOS dan bantuan blockgrant), dari orang tua atau wali murid (SPP dan donasi lain) dan dari masyarakat. Kedua, Perencanaan pembiayaan disusun dan dituangkan dalam RKAS dilakukan tiap akhir tahun pelajaran sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan dan melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Ketiga, Pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi perolehan sumber-sumber pembiayaan pendidikan dan membelajarkan sumber-sumber pembiayaan. Keempat, Pelaporan pembiayaan pendidikan belum sepenuhnya transparan karena hanya dipublikasikan secara terbatas.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Sasongko adalah manajemen pembiayaan pendidikan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada penerapan prinsip manajemen pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan dibatasi pada sarana dan prasarana
8	Ahmad Mushthofa, Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis bebas sumbangan pembiayaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pembiayaan berbasis bebas sumbangan di SMK Cendekia Madiun dilakukan dengan cara mengelola manajemen pembiayaan pendidikan berdasarkan tiga langkah	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Musthofa adalah manajemen pembiayaan pendidikan berbasis bebas sumbangan pembiayaan pendidikan sedangkan

	pendidikan di SMK Cendekia Madiun	metode konseptual manajemen pembiayaan pendidikan : 1). perencanaan dengan melakukan penyusunan RKAS, 2). Pengaplikasian dengan pengelolaan penerima dana dari BOS, BPOP serta UNIPMA dan pengelolaan hasil unit usaha sebagai sumber dana pendidikan, 3). Pengawasan dengan membentuk tim SPI (sistem Pengendali Item), melakukan pelaporan berupa LPJ serta melakukan pengecekan 3 bulan sekali.	penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada penerapan prinsip manajemen pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan dibatasi pada sarana dan prasarana
9	Inggit Hascaryani, Manajemen pembiayaan pendidikan yang bersumber dari BOS dalam rangka mencapai tujuan sekolah di SMP Negeri Ceper	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, manajemen pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan dana BOS telah sesuai dengan standar pembiayaan pendidikan dan juknis sehingga dapat mencapai tujuan sekolah. Kedua, Kendala yang muncul : 1). Keterlambatan pencairan dana BOS 2). Kebutuhan atau kegiatan yang tidak dapat dibiayai dana BOS harus dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat. 3). Tidak ada tenaga administrasi keuangan yang berstatus PNS sehingga yang menjadi tenaga admonistrasi keuangan adalah guru yang kurang memahami administrasi	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Inggit Hascaryani adalah manajemen pembiayaan pendidikan yang bersumber dari BOS dalam rangka mencapai tujuan sekolah sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada penerapan prinsip manajemen pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan dibatasi pada sarana dan prasarana

		keuangan.	
10	Didik Purwanto, Manajemen pembiayaan pendidikan dengan model partisipasi orang tua asuh di SMA NU 1 Bondowoso	Hasil dari penelitian ini antara lain : Pertama, Transparansi keuangan pembiayaan pendidikan dari orang tua asuh terlaksana dengan baik, sistematis dan memenuhi persyaratan pelaporan keuangan. Kedua, Akuntabilitas keuangan pembiayaan sangat baik yaitu dengan menunjuk pengelola yang langsung menyalurkan untuk kebutuhan anak siswa asuh. Ketiga, pembiayaan pendidikan dari orang tua asuh ini sangat efektif dalam menjamin keberlangsungan siswa asuh dalam menyelesaikan pendidikannya.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Didik Purwanto adalah manajemen pembiayaan pendidikan dengan model partisipasi orang tua asuh sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada penerapan prinsip manajemen pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan dibatasi pada sarana dan prasarana
11	Pipin Desniati, Manajemen pembiayaan pendidikan di PONPES Darul Muttaqien Parung Bogor	Dari penelitian yang dilakukan telah menemukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, Kebijakan sistem pembiayaan pendidikan dirancang oleh pimpinan PONPES yang terdiri dari ketua yayasan, wakil pimpinan pondok dan bendahara pondok. Kedua, aspek pelaksanaan sistem pembiayaan mulai berlaku mulai tahun ajaran 2018-2019. Ketiga, terdapat kendala: 1) kurangnya sosialisasi penggunaan sistem dari manual ke online, 2) kurangnya pembinaan SDM yang menjalankan sistem	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Pipin Desniati adalah manajemen pembiayaan pendidikan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada penerapan prinsip manajemen pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan dibatasi pada sarana dan prasarana

		pembiayaan, 3) kurangnya perangkat yang menunjang sistem pembiayaan.	
12	Nur Faizah, Sumber pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu santri (Studi multi situs di PONPES Sidogiri Pasuruan dan PONPES Riyadlul Jannah Pacet	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Memiliki perencanaan sumber pembiayaan pendidikan yang baik. 2) implementasi yang efektif, efisien, transparan dan terbuka dalam perencanaan sumber pembiayaan yang ada. 3) dengan implementasi tersebut telah dapat meningkatkan mutu santri.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizah adalah manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu santri sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada penerapan prinsip manajemen pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan dibatasi pada sarana dan prasarana
13	Zayyinun Munirah, Manajemen pengelolaan keuangan dalam mewujudkan PONPES mandiri (Studi kasus di PNPES Cendekia Darul Lutviah Murni NW Lombok Timur)	Dari analisis data-data terdapat temuan-temuan sebagai berikut: Pertama, manajemen pengelolaan keuangan meliputi a). perencanaan, ini dilakukan setiap tahun dengan melibatkan pengurus pesantren, dewan guru, komite dan perwakilan dari wali santri, b). pengorganisasian, dilakukan dengan merancang program dan menunjuk SDM yang berkompeten dibidangnya, c). pelaksanaan, dilakukan dengan menentukan sumber pendapatan dan pengalokasian dana, d). pengawasan, dilakukan	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Zayyinun Munirah adalah manajemen pengelolaan keuangan dalam mewujudkan PONPES mandiri sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada penerapan prinsip manajemen pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan dibatasi pada sarana dan prasarana

		<p>dengan mewajibkan setiap lembaga yang berada di bawah yayasan untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan. Kedua, implikasi manajemen pengelolaan keuangan yaitu kesejahteraan rohaniyah dan materiah guru terpenuhi, meningkatkan fasilitas pesantren, dan tingginya minat calon santri untuk melanjutkan ke pondok pesantren Cendekia. Ketiga, tantangan manajemen pengelolaan keuangan diantaranya : perkembangan tehnologi informasi, berkembangnya usaha masyarakat, banyak didirikan pondok pesantren dan terjadinya persaingan antar pondok pesantren.</p>	
14	<p>Hafidatul Mufasiroh, Manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan sarana prasarana di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Amanatullah Gambiran Banyuwangi</p>	<p>Hasil temuan dari penelitian ini antara lain : Pertama, Strategi pembiayaan pendidikan di SMP Amanatullah dalam meningkatkan sarana prasarana menggunakan tiga strategi, yaitu: a) Budgeting (perencanaan pembiayaan), b) Accounting (pembukuan pembiayaan), c) Auditing (pemeriksaan pembiayaan)</p>	<p>Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Hafidatul Mufasirah adalah manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan sarana prasarana sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada penerapan prinsip manajemen pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan dibatasi pada sarana dan</p>

			prasarana
15	Hinggil Permana, Manajemen pembiayaan di lembaga perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (studi kasus di sekolah tinggi agama Islam Sukabumi)	Penelitian ini menemukan : Pertama, Latar alamiah pembiayaan di STAI Sukabumi sebagian besar besumber dari mahasiswa dan bantuan yayasan. Kedua, Perencanaan pembiayaan mencakup dua tahap utama yaitu penyusunan RAPB STAI Sukabumi dan pengembangan RAPB STAI Sukabumi. Ketiga, Dalam pengorganisasian pembiayaan, ketua STAI sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan pembiayaan yang berada di bawah kendali yayasan, dan penyebaran dan pelaksanaannya menjadi tanggungjawab bendahara dan penanggungjawab kegiatan. Keempat, Pelaksanaan pembiayaan di STAI terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang sesuai dengan prosedur atau standar yang mengacu pada RAPB STAI. Kelima, Pengawasan pembiayaan dilakukan oleh pihak internal yaitu ketua STAI Sukabumi dan pihak yayasan.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Hinggil Permana adalah manajemen pembiayaan lembaga perguruan tinggi keagamaan Islam swasta sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada penerapan prinsip manajemen pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan dibatasi pada sarana dan prasarana

K. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian dapat dimengerti sebagai cara atau sudut pandang atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian.⁷⁴ maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme sosial yang bertujuan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat konstruksi dengan penemuan-penemuan yang bisa dipercaya (*trustworthiness*) dan asli (*authenticity*). John dan Foss menerangkan bahwa dalam paradigma ini pemahaman terhadap temuan penelitian merupakan produksi dari interaksi antara peneliti dengan realita akan tetapi peneliti lebih menekankan pada realita menjadi sebagai sebuah bangunan konsep yang bermakna dan mudah dipahami.⁷⁵

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dengan menggunakan paradigma ini adalah peneliti mampu membangun makna dari data-data lapangan yang telah dikumpulkan terkait dengan penerapan prinsip-prinsip pembiayaan dalam mengembangkan lembaga pendidikan.

⁷⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁷⁵ Little John and Foss, *Theories of Human Communication* (Long Grove : Waveland Press, 2011).